

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Untuk mengetahui pengawasan terhadap pendistribusian dana zakat, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu:

1. Pengawasan

Pengawasan (Controlling) merupakan sebuah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu (perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan), tidak akan efektif tanpa di sertai fungsi pengawasan. Beberapa ahli manajemen telah mencoba memberikan rumusan tentang definisi pengawasan, diantaranya adalah:

Irham Fahmi mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.⁹

Menurut Sondang P Siagian pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. (Bandung: Alfabeta, 2011), 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰

Menurut George R Terry pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.¹¹

Meskipun para ahli manajemen berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi pengawasan tetapi pada hakekatnya mereka mempunyai maksud yang sama, bahwa pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh perbaikan dengan memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan organisasi yang ditetapkan sebelumnya dengan upaya penetapan standar pelaksanaan kegiatan, menentukan dan mengukur pelaksanaan kegiatan serta pengambilan tindakan koreksi.

Dari hal tersebut, tidak terbayangkan apabila ada suatu organisasi yang di dalamnya tidak ada usaha untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dalam berpegang pada planning dan aturan yang ada. Tugas-tugas sebelumnya berupa, planning, organizing, staffing, dan directing, harus berlangsung dalam bentuk yang digariskan baginya. Hal itu harus diperhatikan dan diawasi, inilah yang dinamakan dengan controlling Bisa dikatakan demikian karena pengawasan merupakan suatu faktor penunjang

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 112

¹¹ George R. Terry, *Asas-asas Manajemen, Edisi kedelapan*. Terj. Winardi (Bandung: Alumni, 2012), 395

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting terhadap efisiensi organisasi, demikian juga pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan.

2. Pendistribusian dana zakat

Penyaluran bentuk Pendistribusian merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi *mustahik* menjadi katagori *muzzaki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat, dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Keberhasilan zakat tergantung pada pengelolaan pengumpulan dan pendistribusiannya. Walaupun seorang yang wajib zakat (*muzzaki*) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarangan orang. Zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahannya yang benar ialah melalui Badan Amil Zakat. Meskipun demikian, Badan Amil Zakat dimanapun tetap memiliki kewajiban untuk mengefektifkan Pendistribusiannya. Pendistribusian efektif ialah efektif manfaatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.¹²

Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana mendistribusikan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan *mustahik* zakat (berhak menerima zakat).¹³

Pemberian zakat kepada para *mustahik*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahik*. Untuk mengetahui kondisi *mustahik* amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahik*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahik* produktif atau konsumtif. Sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara obyektif.¹⁴ Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

¹² Adib Machrus, Andi Yasir, dkk, *Panduan Organisasi Zakat* (Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, Jakarta 2013) 90

¹³ Adib Machrus, Andi Yasir, dkk, *Panduan Organisasi Zakat* (Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, Jakarta 2013) 91

¹⁴ Hasan, M, Ali, *Zakat dan Infaq, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 72

- b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula. Seperti: diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti: kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
- d. Distribusi bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pendistribusian zakat diberikan kepada delapan asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahik*).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah dilakukan semata-mata secara individual dari muzakki diserahkan secara langsung kepada *mustahik*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga

¹⁵Q.S At-Taubah [9] : 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang khusus menangani zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengambilan atau pengumpulan mendistribusikan dan mendayagunakannya secara tepat dan benar.

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahiq. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.¹⁶

3. Pengawasan Pendistribusian Dana Zakat

Pangawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah atau sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
- 2) Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.

¹⁶ DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Direktorat Jenderal BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002) 69

¹⁷ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melakukan tindakan perbaikan (Corrective) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Pengawasan lembaga amil zakat sesungguhnya terkait erat dengan program yang direncanakan, karena itu hakekat dari tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan.¹⁸ Pada prakteknya, pengawasan yang sering dilakukan oleh suatu badan pengawas ataupun organisasi adalah pengawasan yang dilakukan pada saat awal kegiatan atau pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kegiatan berlangsung atau pengawasan berjalan, dan pengawasan pada saat setelah kegiatan selesai atau pengawasan akhir.

Pengawasan awal bertujuan untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standarisasi atau tujuan kegiatan yang dilakukan. Pengawasan berjalan, berlangsung selama kegiatan berjalan. Ini terkait erat dengan cara penanggulangan yang telah diantisipasi dalam perencanaan awal. Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan. Berbeda dengan pengawasan awal dan pengawasan berjalan, pengawasan ini kurang aktif. Meski gejala penyimpangan sudah bisa dideteksi, pengawasan akhir hanya bisa dijalankan di akhir kegiatan. Hasil temuan

¹⁸Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpangan kurang terasa manfaatnya, karena hanya sekedar bahan evaluasi yang tidak dapat merubah apapun kegiatan yang dievaluasi. Tetapi setidaknya bisa dijadikan bahan penting untuk kegiatan berikutnya.¹⁹

Tujuan pengawasan adalah menekan kekeliruan. Maka pengawasan berjalan dapat meminta evaluasi di tengah kegiatan yang sedang berjalan. Bahkan jika hasil evaluasi tersebut mampu melihat penyimpangan atau mustahilnya tujuan dicapai, kegiatan dapat dihentikan berdasarkan rekomendasi pengawasan berjalan.

Pengawasan terhadap pengelolaan zakat tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 34, pembinaan dan pengawasan badan amil zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pembinaan, menurut undang-undang meliputi; sosialisasi, fasilitasi dan edukasi.²⁰

Pengelolaan zakat adalah pengawasan melalui proses auditing. Seluruh neraca keuangan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus terbuka untuk diaudit. Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya neraca keuangan baik oleh auditor internal maupun eksternal sudah menjadi keniscayaan. Auditor internal diwakili

¹⁹ Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, 143-144

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh komisi Pengawas, sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh pemerintah dan masyarakat.²¹

Melalui audit dapat diketahui dan dipastikan pengelolaan zakat, yang dilakukan badan amil zakat dan lembaga amil zakat telah memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam (*shariah compliance*) serta untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat. Keberadaan audit sangat diperlukan selain untuk memberikan kontrol syariah dan pendidikan, auditor dalam struktur Badan Amil Zakat akan meningkatkan kepercayaan terhadap badan amil zakat apabila auditor melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Dengan begitu akan memberikan jaminan atas pengelolaan dana zakat sesuai dengan hukum-hukum zakat dan memberikan keyakinan bahwa personil badan amil zakat layak sebagai amil zakat.²²

Pengawasan juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Agar pengawasan terhadap badan amil zakat menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria pengawasan tersebut diantaranya ialah bahwa sistem seharusnya:²³

- 1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, pengawasan harus tepat waktu, pengawasan dengan biaya yang efektif efisien,

²¹ Umrotul Khasanah, M.Si, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN-MALIKA PRESS, 2010), 67

²² Umrotul Khasanah, M.Si, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 68

²³ Maulanaifiqi <http://www.kompasiana.com/maulanaifiqi/urgenitas-pengawasan-terhadap-lembaga-zakat> (17 Juni 2015 18:39:59)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) pengawasan dituntut tepat-akurat, dan pengawasan harus dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasannya.

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan banding dan untuk melihat posisi penelitian ini maka dilakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “ Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi Tiara Wiwik Sustika menyebutkan bahwa dalam pendayagunaan zakat produktif di Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang efektif terhadap aktivitas kegiatan-kegiatannya tidak tercontrol dengan baik.²⁴

Penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “ Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam Skripsi Maya menyebutkan penelitian ini mengarah pada strategi yang ditempuh oleh Badan Amil Zakat dalam mengawasi pemanfaatan zakat produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁵

²⁴Tiara Wiwik Sustika, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Kuantan Singingi*, (Pekanbaru: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uinsuska, 2015)

²⁵Maya, *Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Manajemen Dakwah , Fakultas Dakwah, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagai penelusuran pustaka diatas, belum ada yang membahas tentang “Pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam pendistribusikan dana zakat di Kecamatan Singingi Hilir”. Meskipun ada kemiripan tetapi substansi yang dikaji berbeda, dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada pengawasan yang dilakukan Baznas Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pendistribusian dana zakat di Kecamatan Singingi Hilir.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti.²⁶ Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pernyataan pernyataan logis.

Kerangka pikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian. ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *Pertama*, Deduksi yaitu proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus atau biasa disebut dari umum

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

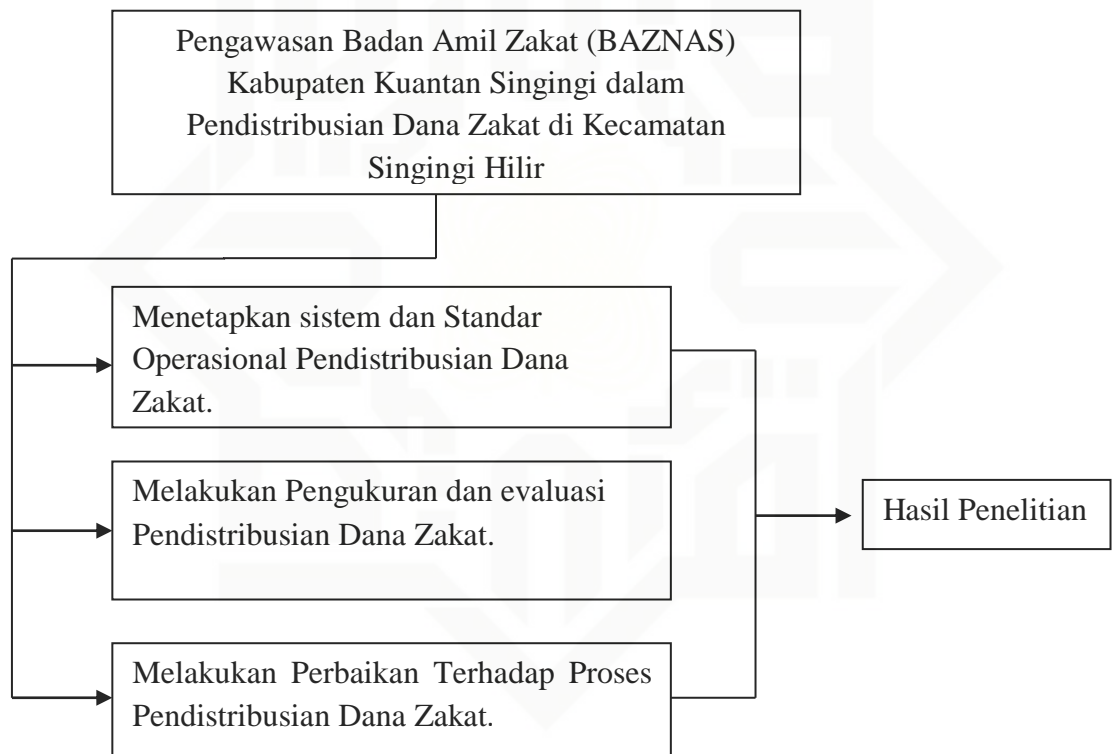
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum atau biasa disebut dari khusus ke umum.²⁷

Untuk memahami pengawasan Badan Amil Zakat Nasional dalam Pendistribusian dana zakat maka kerangka berfikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

²⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 39